

Analisis Maraknya Eksploitasi Buruh Anak pasca Liberalisasi Perdagangan di Tiongkok

Anak Agung Yumas Sukmatika

Universitas Bali Internasional

yumassukmatika@unbi.ac.id

Abstract

This study employs Marxism theory to examine the factors contributing to the escalation of child labor in China. China has undergone substantial economic growth since the implementation of trade liberalization and economic reform in 1978. Presently, China holds the position of being the world's second-largest economy following the United States (US). Nevertheless, the prevalence of child labor has risen due to pronounced economic disparities between urban and rural areas coupled with a demand for low-cost labor in the industrial sector. This study employs a qualitative method with a literature review approach to analyze non-numeric and descriptive data from various literature sources, including books, journal articles, and research reports. This study demonstrates that trade liberalization has exacerbated labor exploitation in China. Local governments as well as businesses frequently disregard regulations that prohibit child labor in order to maximize their profits. Furthermore, there exists a pervasive perception that children are economic assets rather than individuals requiring care and education. Many Chinese families rely on their children as the primary means of economic sustenance for the family, neglecting their educational needs. The findings of this research indicate persistent and worsening exploitation of child labor contrary to expectations of improved well-being through economic advancement. Ultimately, the fundamental tenets of Marxism, such as historical materialism, economic determinism, and false consciousness, are crucial for comprehending the rise of child labor in China.

Keywords: china, trade liberalization, child labor, marxism

Abstrak

Penelitian ini menggunakan teori Marxisme guna menyelidiki alasan di balik meningkatnya jumlah buruh anak di Tiongkok. Sejak liberalisasi perdagangan dan reformasi ekonomi dimulai pada 1978, Tiongkok telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Saat ini ekonomi Tiongkok berada di posisi kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat (AS). Namun jumlah buruh anak telah meningkat karena adanya perbedaan ekonomi terutama antara kota dan desa serta kebutuhan akan tenaga kerja murah di industri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis data non-numerik dan deskriptif dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Studi ini menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan telah memperburuk eksploitasi tenaga kerja di Tiongkok. Regulasi yang melarang pekerja anak sering diabaikan oleh pemerintah setempat termasuk perusahaan untuk meningkatkan keuntungan. Selain itu terdapat asumsi yang dinormalisasi bahwa anak-anak adalah sumber pendapatan daripada individu yang membutuhkan perawatan dan pendidikan. Banyak orang tua Tiongkok mempekerjakan anak-anak sebagai penopang ekonomi keluarga daripada memberikan dukungan pendidikan yang cukup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi buruh anak masih ada dan bahkan meningkat meskipun pertumbuhan ekonomi seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya asumsi-asumsi dasar Marxisme yakni *historical materialism*, *economic determinism*, dan *false consciousness* berkontribusi signifikan dalam menjawab alasan di balik peningkatan jumlah buruh anak di Tiongkok.

Kata kunci: tiiongkok, liberalisasi perdagangan, buruh anak, marxisme

PENDAHULUAN

Tiongkok merupakan negara dengan laju pertumbuhan ekonomi sangat pesat. Berdasarkan data dari International Monetary Fund (IMF), sejak tahun 2010 hingga 2021, Tiongkok menduduki peringkat ekonomi terbesar kedua di dunia setelah AS. Ross Garnaut dan Ligang Song dalam "*China: Twenty*



Years of Economic Reform" mengatakan bahwa pesatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok merupakan akibat dari terbukanya Tiongkok terhadap liberalisasi perdagangan (Garnaut & Song, 2012).

Liberalisasi perdagangan dan bergabungnya Tiongkok sebagai anggota World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001 semakin mendorong pertumbuhan ekonomi negara tersebut. PDB per kapita Tiongkok meningkat secara substansial dari sekitar USD 959 pada tahun 2000 menjadi lebih dari USD 10.000 pada tahun 2020. Angka pengangguran di Tiongkok pun berkurang dari 10,6% pada 2002 menjadi hanya sekitar 3,6% pada 2020 (World Trade Organization, 2020).

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi tidak menjamin kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat. Terjadi ketimpangan ekonomi yang signifikan antara masyarakat desa dan kota. Bahkan, jumlah buruh anak di Tiongkok justru meningkat sejak liberalisasi perdagangan. Dari total seluruh tenaga kerja di Tiongkok pada tahun 2003, 20% dari mereka adalah anak-anak dengan rentang usia 10-14 tahun (China Labour Bulletin, 2007). Jumlah buruh anak di Tiongkok pun meningkat dari sekitar 10 juta pada tahun 2000 menjadi 12 juta pada 2020 (Tang et al., 2018).

Banyak perusahaan memperlakukan buruh anak tidak sesuai dengan standarisasi kerja yang berlaku. Banyak pabrik mengharuskan mereka untuk mengoperasikan alat produksi yang seharusnya ditujukan untuk orang dewasa, memberikan jam kerja yang panjang, hingga tidak menyediakan asuransi kepada para pekerjanya. Anak-anak pada rentang usia tersebut seharusnya difokuskan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sesuai rekomendasi International Labour Organization (ILO) yang telah diterapkan oleh banyak negara, termasuk Indonesia, anak diperbolehkan bekerja apabila pekerjaan tersebut tergolong ringan dan tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial dari anak tersebut. Lebih lanjut, anak hanya diperbolehkan bekerja apabila pekerjaan tersebut dapat menunjang minat dan bakat si anak (International Labour Organization, 2002). Namun, apabila anak sengaja dipekerjakan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena kesulitan ekonomi, maka ini cenderung dapat menurunkan kualitas mereka sebagai sumber daya unggul di masa depan.

Melihat praktik kerja buruh anak di Tiongkok, keberadaan buruh anak berdampak negatif baik dalam jangka panjang maupun pendek bagi negara tersebut. Dalam jangka pendek, anak yang dipekerjakan atau menjadi buruh menyebabkan gangguan perkembangan otak, gangguan kesehatan fisik dan mental, serta prestasi sekolah yang buruk. Dalam jangka panjang, keberadaan buruh anak dapat mendorong terciptanya status sosial-ekonomi yang rendah dan kurangnya keterampilan di masa dewasa. Ini tentunya mengurangi kualitas sumber daya manusia Tiongkok yang secara otomatis akan berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Tiongkok di masa mendatang.

Tiongkok telah melakukan upaya-upaya dalam rangka mencegah sekaligus mengurangi jumlah buruh anak. Tiongkok dalam hal ini telah menandatangani Konvensi Usia Minimum ILO dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Terdapat juga sejumlah peraturan nasional yang melarang pekerja anak. Peraturan tersebut mencakup ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Tiongkok, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur, Peraturan tentang Larangan Pekerja Anak, hingga Pemberitahuan tentang Larangan Pekerja Anak (International Labour Organization, 2002).

Namun, peningkatan jumlah buruh anak di Tiongkok tidak terhindarkan. Eskalasi tersebut didukung oleh beberapa kondisi seperti kemiskinan di daerah pedesaan, kurangnya akses ke pendidikan, dan kebutuhan akan tenaga kerja murah di industri manufaktur (Morley, 2010). Penelitian ini, kemudian, bertujuan untuk menyelidiki alasan di balik meningkatnya jumlah buruh anak di Tiongkok meskipun pertumbuhan ekonomi Tiongkok tumbuh begitu relevan.

METODE

Penulis menganalisis masalah yang ditampilkan dalam penelitian ini dengan metode kualitatif. Penulis menganalisis data non-numerik dan deskriptif untuk memahami fenomena atau anomali tertentu terkait alasan di balik peningkatan jumlah buruh anak pada kondisi perekonomian Tiongkok yang seharusnya dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Penulis mengumpulkan data dan informasi dari penelitian serta jurnal terdahulu yang membahas luasnya eksploitasi buruh anak.



Pendekatan kualitatif, khususnya melalui sistem studi pustaka—juga dikenal sebagai tinjauan literatur—merupakan metode yang paling sesuai untuk diterapkan pada penelitian ini. Pendekatan ini membantu penulis dalam mengidentifikasi dan memahami sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian serta memverifikasi dan membenarkan validitas dan kredibilitas hipotesis maupun data yang dikumpulkan. Penulis melakukan studi pustaka dengan membaca berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber akademis lainnya dari pusat penelitian akademis atau perpustakaan universitas yang menyediakan akses ke jurnal-jurnal ilmiah. Metode studi pustaka memastikan bahwa penelitian berdasar pada teori dan didukung oleh bukti empiris yang telah diuji sehingga tepat digunakan sebagai metode pada penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teori Marxisme oleh Karl Marx untuk menganalisis alasan di balik peningkatan jumlah buruh anak di Tiongkok di tengah pertumbuhan ekonominya yang semakin baik. Marxisme menjadi pisau analisis untuk mengkritik kapitalisme yang salah satunya diperlihatkan dari masifnya liberalisasi perdagangan. Kapitalisme dengan mengutamakan taraf ekonomi dan bersifat opresif memperlakukan manusia sebagai komoditas yang tidak dimanusiakan. Selain itu, Marxisme mendapatkan adanya implikasi politik berupa pemisahan signifikan antara ruang publik dan privat. Hal tersebut memperkuat kemungkinan eksploitasi manusia dan membuat penegakan hukum untuk perilaku yang tidak berperikemanusiaan serta ilegal semakin sulit dilakukan.

Kritik Marx terhadap kapitalisme berangkat dari tiga asumsi dasar Marxisme, yang kemudian digunakan dalam penelitian ini untuk memahami secara komprehensif sifat dasar perekonomian yang dapat berdampak buruk bagi kemanusiaan dan mendorong peningkatan angka buruh anak di Tiongkok (Marx, 1887). Argumen pertama Marx adalah terkait *historical materialism*, yang menekankan bahwa perkembangan intelektual serta hubungan antar manusia dengan sesama dan lingkungannya ditentukan oleh kondisi material yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Dengan demikian, kebutuhan material mendahului kesadaran. Pergulatan utama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan materialnya, yang kemudian membawa manusia pada pergulatan dengan alam sebagai bahan pemenuhan kebutuhan material tersebut. Manusia, oleh karenanya, membangun kondisi produktif atau melakukan transformasi terhadap alam dalam rangka memenuhi kebutuhan materialnya (Marx, 1887).

Kedua, adalah *economic determinism*. Argumen ini menekankan bahwa masyarakat terbagi ke dalam kelas-kelas ekonomi yang bersaing, dengan kekuatan politik relatifnya ditentukan oleh sifat sistem ekonomi, yakni sistem yang menyerahkan kendali ekonominya pada swasta guna mendapatkan keuntungan. Lebih lanjut, hubungan ekonomi (layaknya menjadi pemilik/kapitalis atau menjadi pekerja/proletar), adalah landasan dari semua tatanan sosial dan politik dalam masyarakat. Dengan kata lain, ekonomi adalah fondasi utama dalam menentukan sektor-sektor masyarakat lainnya. Ini berarti bahwa basis ekonomi (termasuk didalamnya adalah proses atau mode produksi dan distribusi) menentukan superstruktur yang mencakup institusi politik, hukum dan penegakan hukum, ideologi, hingga budaya, di tengah masyarakat. Pada sistem ekonomi kapitalis, kendali ekonomi dan kekuatan politik cenderung berada di pihak pemilik modal.

Ketiga, yakni *false consciousness*. Teori ini melihat bahwa individu atau kelas sosial tidak menyadari kepentingan sebenarnya mereka karena manipulasi ideologis oleh kelas yang berkuasa. Ini berarti bahwa pekerja atau proletariat “terlihat” atau bahkan “mungkin” mendukung sistem kapitalis yang merugikan. Dalam hal ini, individu atau kelas sosial telah dikungkung oleh ideologi dominan yang mencerminkan kepentingan kelas penguasa.

Lebih lanjut, dalam bukunya *Das Kapital* tahun 1867, Marx berargumen bahwa modernisasi dalam industri tidak menghilangkan peran manusia melainkan menggesernya dari semula penggerak utama menjadi operator peralatan produksi yang telah dimodernisasi untuk memproduksi dengan lebih banyak, tepat, ataupun cepat dari sebuah produk (Marx, 1887). Kelebihan yang dimiliki peralatan modern ini memberikan kesempatan untuk memproduksi dengan jumlah berlipat-lipat, sehingga mendorong produsen untuk mengejar keuntungan yang lebih besar. Meski demikian, di sisi lain, peralatan tersebut memiliki limitasi dari sisi operasional seperti batas pemakaian per hari dan kerusakan akibat penggunaan yang melewati batas waktu. Selain itu, pemilik modal yang mampu membeli peralatan dalam jumlah ekstensif baik untuk menghasilkan sebanyak mungkin produk di saat bersamaan maupun bergantian sehingga produksi tidak pernah berhenti, tentunya membutuhkan buruh yang lebih banyak untuk mengoperasikannya dengan jam kerja yang ekstensif pula. Maka dari itu, pergeseran yang terjadi justru meningkatkan peluang eksploitasi pada manusia, terkhusus anak-anak, seperti yang terjadi di Tiongkok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Historical Materialism, Liberalisasi Perdagangan, dan Buruh Anak di Tiongkok

Bergabungnya Tiongkok dalam dunia internasional setelah reformasi tahun 1978 menjadikannya negara yang memiliki peran krusial dalam rantai perdagangan internasional. Pada tahun 2014, Tiongkok menjadi negara pengekspor sekaligus pengimpor tertinggi di dunia, dengan proporsi pendapatan agregat dari hasil perdagangan internasional mencapai 50% dari PDB atau Produk Domestik Bruto (World Trade Organization, 2020). Sejak 1978, para pembuat kebijakan Tiongkok mendorong lebih banyak investasi asing langsung serta perluasan ekspor dan impor. Di samping itu, interdependensi antara Tiongkok dengan negara lainnya meningkat ketika menjadi anggota WTO pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan WTO pada tahun 2000, volume perdagangan Tiongkok hanya sekitar 4% dari total perdagangan dunia, tetapi setelah menjadi anggota WTO, angka tersebut meningkat mencapai 12% pada tahun 2014.

Salah satu spesialisasi Tiongkok adalah merakit komponen menjadi barang setengah jadi maupun jadi. Misalnya, pada tahun 2019, Tiongkok menjadi negara pengekspor besi setengah jadi terbesar ke-31 di dunia dengan total pendapatan sebesar 101 juta dolar (The Observatory of Economic Complexity, 2020). Banyak perusahaan multinasional, baik dari Jepang, Taiwan, maupun Amerika Serikat, menggunakan jasa Tiongkok sebagai tempat akhir untuk merakit produk yang akan mereka pasarkan di dunia internasional. Dampaknya, Tiongkok mengalami modernisasi dan kemajuan teknologi di samping peran pentingnya sebagai pusat produksi dunia. Jumlah tenaga kerja yang meningkat dari sekitar 100 juta pada tahun 1980 menjadi lebih dari 750 juta pada tahun 2020 menopang tingkat produksi besar-besaran dan mengakomodasi kebutuhan industri Tiongkok (International Labour Organization, 2002).

Sejalan dengan argumen *historical materialism* Marx, Tiongkok melakukan reformasi ekonomi karena kebutuhan atas kondisi materialnya. Elemen utama perkembangan intelektual dan kebijakan liberalisasi ekonomi Tiongkok adalah penilaian ulang perdagangan dan sistem perdagangan yang dianut sebelumnya. Tiongkok, sebelum 1978, digambarkan sebagai negara proteksionisme yang sepenuhnya tertutup dan merkantilis. Situasi ini dianggap tidak memberikan efek positif terhadap perkembangan perekonomian domestik oleh para pemangku kebijakan di negara tersebut (Zhang, 1997). Tiongkok menyadari bahwa kebijakan proteksionisme membawa ketertinggalan ekonomi dibandingkan tetangganya, seperti Rusia dan Taiwan, dengan PDB per kapita Tiongkok di tahun tersebut hanya sekitar USD 156, jauh tertinggal dibandingkan Rusia yang mencapai USD 2.321 dan Taiwan sebesar USD 1.976 (Garnaut & Song, 2012).

Situasi tersebut mendorong para pemimpin Tiongkok menyadari urgensi liberalisasi perdagangan karena dianggap dapat memberikan peningkatan pada perekonomian domestik. Kepemimpinan Tiongkok pun berkomitmen untuk mereformasi rezim perdagangannya secara unilateral. Akibatnya, jumlah kerja sama perdagangan Tiongkok dengan negara lain terus mengalami peningkatan pasca 1979. Jumlah tenaga kerja Tiongkok di sektor industri karena reformasi perdagangan juga meningkat signifikan dari sekitar 69 juta pada tahun 1978 menjadi lebih dari 123 juta pada 1990 (Garnaut & Song, 2012). Lebih lanjut, liberalisasi meningkatkan prevalensi *spillover* teknologi karena hambatan perdagangan menurun. *Spillover* semacam itu, kemudian, mampu meningkatkan daya saing industri, sehingga mendorong peningkatan ekonomi Tiongkok (Gunter & Meldrum, 1997). Terbukti, Tiongkok telah mencapai rata-rata peningkatan PDB begitu pesat yakni lebih dari 9% per tahun (China Power, n. d.). Angka tersebut bahkan jauh melampaui laju pertumbuhan PDB rata-rata global yang tidak melebihi 5% (IMF, 2024).

Reformasi ekonomi dan modernisasi yang pesat menciptakan kebutuhan besar akan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan mesin-mesin canggih di Tiongkok. Menurut Marx, industrialisasi mengubah peran manusia dari penggerak utama produksi menjadi operator mesin. Untuk mengurangi biaya produksi, banyak perusahaan mempekerjakan anak-anak sebagai operator mesin karena upah mereka lebih rendah dibandingkan pekerja dewasa. Perbandingan biaya produksi menunjukkan bahwa upah anak-anak bisa mencapai maksimal 30% dari upah pekerja dewasa, yaitu sekitar USD 106 per



bulan dibandingkan upah minimum nasional pekerja dewasa sebesar USD 355 per bulan (Take-Profit.org, n.d.). Hal ini membuat perusahaan dapat menghemat hingga USD 249 atau sekitar 70% lebih murah dibandingkan mempekerjakan pekerja dewasa. Dengan demikian, permintaan akan tenaga kerja murah, yang seringkali adalah anak-anak, meningkat seiring dengan pertumbuhan industri manufaktur Tiongkok yang pesat. Anak-anak tersebut pun terlibat di berbagai industri, mulai dari tekstil hingga perakitan elektronik. Situasi ini mirip dengan eksploitasi ekonomi yang digambarkan oleh Marx, yakni kapitalis atau pemilik modal mencoba mengurangi biaya tenaga kerja untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

False Consciousness dan Economic Determinism di Tiongkok

Liberalisasi ekonomi Tiongkok yang erat kaitannya dengan sistem ekonomi kapitalis memunculkan kelas-kelas sosial di masyarakat. Kesenjangan ekonomi serta keberadaan kelas kapitalis dan proletar semakin signifikan terlihat. Terkait hal tersebut, keuntungan yang didapatkan perusahaan tidak serta merta menjamin kesejahteraan bagi semua yang terlibat dalam pekerjaan. Tiongkok, meski saat ini menyumbang 18% dari total kekayaan dunia, namun hal tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat secara merata (USC Annenberg, 2020). Menurut Li Keqiang, pada tahun 2021, 600 juta warga Tiongkok hanya berpenghasilan sekitar 1.000 yuan atau sekitar USD 137 per bulan, di bawah upah minimum di beberapa provinsi (Kolk, Ans, and Rob Van Tulder, 2002). Lebih lanjut, upah minimum terendah di Tiongkok di tahun yang sama, tepatnya di provinsi Liaoning pun, menginjak angka 1.120 yuan atau sekitar USD 154 per bulan. Sementara, upah minimum tertinggi di Tiongkok berada di Shanghai, yaitu sebesar 2.590 yuan atau setara dengan sekitar USD 356 per bulan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa banyak buruh di Tiongkok yang mendapatkan upah di bawah standar minimum nasional, dan kesenjangan antara upah minimum terendah dan tertinggi mencapai 131% (Qian Zhou and Zoey Zhang, 2021).

Situasi tersebut, kemudian, membuat banyak keluarga pra-sejahtera atau proletar, bergantung pada pendapatan anak-anak mereka (Grootaert, dkk, 1995). Menurut data China Labour Bulletin (2023), di saat yang sama, karena kesenjangan yang terjadi dan tuntutan akan kebutuhan material yang lebih banyak, banyak keluarga yang menginginkan penghasilan tambahan dari anak-anak mereka. Kesenjangan ekonomi yang tajam antara kota dan desa serta didukung oleh tingkat pendidikan rendah, kemudian, menyebabkan tingkat buruh anak di Tiongkok meningkat. Buruh anak menjadi bagian penting dari kelangsungan perekonomian, meski upah yang diterima rendah. Pekerja di bawah umur tersebut biasanya ditemukan di posisi layanan tingkat rendah atau industri padat karya (China Labour Bulletin, 2007). Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga pra-sejahtera sering putus sekolah dan bekerja untuk membantu keuangan atau perbaikan perekonomian keluarga. Karena keterbatasan ekonomi, banyak keluarga mengirim anak-anak mereka bekerja daripada mendaftarkan mereka ke sekolah. Hal ini, kemudian, mendorong terciptanya *false consciousness*, yang membuat mereka menerima eksploitasi anak sebagai hal yang wajar. Masyarakat Tiongkok, sejalan dengan paham Marxisme tersebut, melihat anak-anak mereka sebagai sumber pendapatan daripada individu yang membutuhkan perawatan dan pendidikan. Akibatnya, jumlah buruh anak terus meningkat dan mencerminkan eksploitasi dalam sistem kapitalis, meskipun ekonomi Tiongkok berkembang (He, Huajing, 2016).

Tuntutan akan kebutuhan material turut membentuk pola penegakkan hukum di Tiongkok yang mendukung lebih banyak keuntungan ekonomi. Hal ini sesuai dengan *economic determinism* Marx, bahwa basis ekonomi menentukan superstruktur, salah satunya hukum dan penegakannya. Sayangnya, dalam rangka menunjang taraf ekonomi negara, pemerintah Tiongkok cenderung menegasikan penegakkan hukum, khususnya terkait peraturan atau undang-undang dalam hal buruh anak.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Tiongkok sempat mengeluarkan Regulasi Larangan Pekerja Anak pada tahun 2002 yang melarang pekerja di bawah umur 16 tahun, di samping pula regulasi-regulasi lain yang mendukung pencegahan sekaligus pengurangan jumlah buruh anak. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk mencegah anak-anak dieksploitasi dan memberi mereka akses ke pendidikan yang layak. Namun, keberadaan regulasi tersebut tidak cukup untuk mengurangi jumlah buruh anak di Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok justru melaksanakan program yang kontradiktif dengan regulasi di atas. Contohnya pada program *work-study* yang dibentuk pada tahun 1993, bahwa program tersebut tidak menyantumkan batasan umur, waktu, dan jenis pekerjaan yang menghindari pemanfaatan buruh anak. Dengan demikian, program tersebut dijadikan celah bagi perusahaan untuk mempekerjakan anak-anak

di bawah umur. Walaupun tujuan dari dibuatnya program *work-study* adalah untuk memberikan pengalaman bekerja selama sekolah, namun program tersebut justru menciptakan pemaksaan kerja dalam waktu yang berlebih serta membatasi anak untuk bertemu dengan orang tuanya (ILO, 2002). Program *work-study*, dalam praktiknya, memaksa anak-anak untuk bekerja selama 12 jam per hari. Laporan memperlihatkan bahwa sejumlah besar anak tinggal di asrama yang disediakan oleh perusahaan selama masa kerja, dan mereka hanya diberikan kesempatan satu kali dalam beberapa bulan untuk bertemu dengan orang tuanya. Hal ini, pada akhirnya, mendorong ketidakberhasilan regulasi dan dengan demikian turut meningkatkan jumlah buruh anak di Tiongkok.

Lebih lanjut, sejalan dengan pandangan Marxis, minimnya penegakan regulasi tersebut juga disebabkan oleh Pemerintah Tiongkok yang memisahkan ruang publik dan privat secara signifikan tanpa adanya aturan yang tegas (Organisation Economic Co-Operation and Development, 2002). Hal tersebut menyebabkan tidak terdeteksinya tenaga kerja di bawah umur pada perusahaan-perusahaan swasta, di samping pula didukung dengan padatnya tenaga kerja yang dibutuhkan di Tiongkok (The World Bank, 2021). Tingkat buruh anak cenderung sulit diukur karena kurangnya pelaporan resmi serta rendahnya transparansi data di Tiongkok (China Labour Bulletin). Dalam beberapa kasus, dikemukakan bahwa buruh anak tidak bekerja di bawah kontrak tertulis (Aaron Halegua, 2007). Faktor tersebut menjadi salah satu alasan mereka tidak dapat terlindungi oleh payung hukum, karena kedua pihak belum menandatangani perjanjian kerja secara formal. Terlebih, banyak kasus kekerasan terhadap anak yang sering luput dari pengawasan pemerintah Tiongkok. Terdapat praktik penculikan anak yang kemudian dijadikan buruh dan diperparah dengan kenyataan bahwa mereka diharuskan bekerja dengan waktu yang lama, hingga mengoperasikan alat pabrik yang seharusnya ditujukan kepada orang dewasa. Tidak berhenti di situ, banyak juga buruh anak yang pada akhirnya menerima kekerasan seksual serta mengalami kurang gizi ketika bekerja (RSS, 2012). Lebih lanjut, banyak perusahaan swasta masih menggunakan jasa buruh ilegal termasuk buruh anak sekaligus memperlakukan mereka tidak sesuai dengan standardisasi kerja berlaku. Pabrik-pabrik Tiongkok telah mempekerjakan buruh anak, memberikan jam kerja yang panjang, serta tidak menyediakan asuransi kepada para pekerjanya. Anak-anak, yang seharusnya bersekolah, dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi dan keras. Anak-anak ini seringkali bekerja siang dan malam tanpa perlindungan hukum yang memadai. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa buruh anak di Tiongkok jelas memenuhi indikator kriteria buruh anak berbahaya versi rekomendasi ILO No. 190 Artikel 3 (Giuseppe, 2021).

Pemisahan signifikan dan regulasi yang tidak tegas antara ruang publik dan privat, kemudian, memperkuat terjadinya eksploitasi manusia. Dalam ruang privat, tindakan eksploitasi bisa lebih mudah terjadi tanpa pengawasan yang memadai dari masyarakat atau negara. Misalnya, pekerja rumah tangga atau pekerja di sektor informal seringkali menghadapi kondisi kerja yang buruk atau gaji yang tidak adil tanpa perlindungan yang cukup. Pada saat yang sama, pemisahan ini membuat penegakan hukum terhadap perilaku yang tidak berperikemanusiaan serta ilegal menjadi lebih sulit. Dalam ruang privat, tindakan ilegal seperti kekerasan dalam rumah tangga atau eksploitasi anak mungkin tidak terdeteksi oleh otoritas hukum, karena mereka terjadi di balik pintu tertutup dan jauh dari pandangan publik.

Buruknya penerapan kebijakan yang terjadi pada pemerintahan Tiongkok menjadi salah satu faktor yang memperkeruh kondisi buruh anak di negara tersebut (Anthony Saich, 2012). Hal ini berbanding lurus dengan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh kasus ketidaksejahteraan di Tiongkok adalah ketika perusahaan Apple berusaha untuk menyelidiki perusahaan manufaktur di Tiongkok yang merakit produknya dan menemukan tingginya kasus buruh bunuh diri yang terjadi di perusahaan tersebut (Sarah Puspa Sari, 2015). Pada tahun 2010, Foxconn, salah satu pemasok utama Apple, melaporkan 18 kasus bunuh diri di kalangan pekerjanya. Kasus ini terungkap setelah sejumlah media internasional melaporkan kondisi kerja yang keras dan tidak manusiawi di pabrik Foxconn, serta adanya tekanan dari kelompok advokasi hak asasi manusia (Sarah Puspa Sari, 2015). Contohnya, seorang pekerja bernama Sun Danyong berusia 25 tahun, melompat dari apartemennya setelah dituduh mencuri prototipe iPhone (Eva Dou, 2021). Dengan demikian, tingginya permintaan akan tenaga kerja murah, kurangnya penegakan hukum, hingga kurangnya pengawasan di lapangan menghambat keberhasilan regulasi tersebut. Akibatnya, meskipun ada peraturan, banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi dan tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas. Ditemukan banyak kasus buruh anak dipekerjakan dalam kondisi berbahaya dan bekerja dengan waktu yang berlebihan,



namun pelanggaran ini sering kali tidak mendapatkan tindakan hukum yang memadai oleh otoritas Tiongkok (Tim Culpan and Adam Santariano, 2013). Dalam banyak kasus, hukuman bagi perusahaan yang menggunakan buruh anak tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh jika menggunakan buruh anak (China Labour Bulletin, 2023).

Penjabaran di atas, sekali lagi, sesuai dengan asumsi dasar *economic determinism* Marx, bahwa basis ekonomi menentukan superstruktur baik institusi politik, ideologi, budaya, hingga penegakan hukum. Sayangnya, hukum atau kebijakan yang terkait dengan penerapan regulasi pembatasan buruh anak belum dilaksanakan sesuai dengan semestinya. Lebih lanjut, pelaksanaan regulasi di Tiongkok yang kurang memadai, memperlihatkan bahwa Tiongkok masih melihat pemanfaatan buruh anak lebih menguntungkan karena berkontribusi dalam peningkatan ekonomi secara agregat (mengingat pemanfaatan buruh anak dengan harga murah dapat menekan biaya produksi) dibandingkan menjalankan regulasi dengan baik, yang tentunya dapat meningkatkan porsi biaya dan dengan demikian mengurangi keuntungan yang dapat dikumpulkan oleh kapitalis Tiongkok. Buruh yang murah di bawah sistem ekonomi kapitalisme, dengan demikian, menjadi salah satu mesin utama untuk menunjang produktivitas Tiongkok dalam pangsa perdagangan yang besar (Amir Effendi Siregar, 2010). Kapitalis menilai bahwa pemanfaatan buruh anak dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar mengingat penggunaan teknologi lebih mahal untuk beradaptasi jika dibandingkan dengan tenaga buruh, terutama pada saat proses produksi dari hasil inovasi produk yang mereka selalu lakukan, seperti lamanya waktu adaptasi dan besarnya biaya yang diperlukan terhadap inovasi yang ada (Prasad Akella, 2019).

Marxisme menekankan bahwa eksploitasi kelas pekerja oleh pemilik modal adalah hal yang normal dalam masyarakat kapitalis. Banyak keluarga masih hidup dalam kemiskinan di Tiongkok, terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang cepat. Kapitalis, dalam hal ini pemilik perusahaan, terus mencari cara untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan mereka. Salah satu cara mereka dalam melakukan ini adalah dengan menggunakan tenaga kerja anak-anak yang murah.

Keadaan tersebut, pada akhirnya, menunjukkan kontradiksi dalam sistem kapitalis. Dalam hal ini, kemajuan ekonomi yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menyebabkan kelas pekerja, terutama anak-anak, dieksploitasi lebih lanjut. Ideologi dominan menanamkan kesadaran palsu atau *false consciousness* yang mendorong keluarga proletar untuk menerima keadaan tersebut sebagai normal dan tak terhindarkan. Mereka mengabaikan potensi pendidikan dan pertumbuhan anak mereka untuk mengejar kebutuhan finansial mereka saat ini (Pal, Debarati, 2014).

Akibatnya, meskipun ada peraturan dan hukum yang melarang penggunaan buruh anak, pelanggaran ini terus terjadi karena kurangnya penegakan hukum dan pengawasan. Ini menunjukkan bahwa sistem politik dan ekonomi Tiongkok diatur oleh kepentingan kapitalis dan mengabaikan kesejahteraan kelas pekerja, terutama buruh anak. Tentu, dalam rangka mengatasi masalah buruh anak secara efektif dalam konteks ini, tidak hanya kebijakan dan regulasi yang ada di permukaan yang diperlukan, tetapi juga perubahan sistemis secara mendalam.

PENUTUP

Tiongkok, meski tumbuh menjadi poros ekonomi dunia, namun hal tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat secara merata (USC Annenberg, 2020). Menurut Qian Zhou and Zoey Zhang (2021), banyak buruh di Tiongkok yang mendapatkan upah di bawah standar minimum nasional, masih tajamnya kesenjangan desa-kota, hingga pembagian begitu jelas antara kaya dan miskin. Sebagai dampaknya, timbul norma budaya dan sosial yang mencegah anak-anak untuk bersekolah. Situasi tersebut menyebabkan peningkatan dalam jumlah pekerja anak karena banyak anak-anak yang putus sekolah, dan dipekerjakan (Andrea Morley, 2010).

Historical materialism Tiongkok yang sadar akan ketertinggalan ekonomi dan karenanya melakukan transformasi atau liberalisasi, sayangnya, tidak didukung dengan penerapan regulasi yang memadai. Banyak buruh anak dimanfaatkan dalam rangka menekan biaya produksi dan menguntungkan kapitalis. Kondisi seperti ini, pada akhirnya, mengkonfirmasi adanya *economic determinism*, yakni lingkungan yang memaksa masyarakat untuk tetap bertahan hidup dengan kondisi ekonomi yang ada. Banyak keluarga pra-sejahtera bergantung pada pendapatan anak-anak mereka. Akibatnya, muncul kelas-kelas masyarakat hingga adanya kesenjangan ekonomi tajam antara kota dan desa. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya pemikiran masyarakat yang keliru atau *false consciousness* sehingga

memanfaatkan anak sebagai penopang ekonomi keluarga daripada mendukung mereka untuk menempuh pendidikan.

Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa keberadaan liberalisasi perdagangan di Tiongkok meningkatkan interdependensi Tiongkok dengan negara lain, sekaligus memicu perkembangan dalam sektor industrialnya. Hal ini disebabkan karena besarnya peran Tiongkok dalam perdagangan internasional dan ambisinya untuk mengembangkan perekonomian negara. Hal tersebut, ternyata, mendorong peningkatan buruh anak. Buruh anak di Tiongkok dianggap sebagai nilai tambah bagi swasta termasuk pemerintah Tiongkok sendiri dalam meningkatkan *profit* mereka. Meskipun praktik buruh anak berdampak negatif terhadap hak asasi serta standardisasi kebijakan buruh yang telah diatur oleh pemerintah, tetapi kedua pihak tersebut terkesan acuh. Dapat dibuktikan dari rendahnya tingkat penerapan serta keberadaan buruh anak yang tidak kunjung habis di tengah kemajuan ekonomi dan teknologi Tiongkok yang pesat.

Penelitian ini menemukan bahwa liberalisasi perdagangan menghadirkan masalah baru terkait pekerja baik dalam segi sosial maupun ekonomi sehingga kesejahteraan rakyat di Tiongkok mulai dipertanyakan. Ditambah dinamika dari faktor demografi serta mengakarnya *false consciousness*, semakin memicu peningkatan buruh anak. Maka, dapat disimpulkan bahwa keberadaan liberalisasi perdagangan di Tiongkok berperan terhadap kenaikan angka buruh anak di negara tersebut. Pernyataan ini didukung oleh teori Marxisme yang mengatakan bahwa kemunculan liberalisme dapat mengarahkan penggunaan tenaga kerja manusia secara tidak manusiawi, ditambah dengan asumsi-asumsi dasar yang dibawa Marxisme pada isu ini seperti *historical materialism*, *economic determinism*, dan *false consciousness*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akella, P. (2019, August 19). OK computer: Why the machine age still needs humans. *World Economic Forum*. Retrieved from <http://www.weforum.org/agenda/2019/08/machine-age-computers/>
- Apple. (2011, February). Apple supplier responsibility. *2011 Progress Report*, 9.
- Barboza, D. (2006, February 9). Some assembly needed: China as Asia factory. *The New York Times*. Retrieved from <https://www.nytimes.com/2006/02/09/business/worldbusiness/some-assembly-needed-china-as-asia-factory.html>
- Blazyte, A. (2020, November 10). Topic: Export trade in China. *Statista*. Retrieved from <https://www.statista.com/topics/1456/export-in-china/>
- Chakrabarti, A., & Dhar, A. K. (2007). Children's working world through the lens of class. *Journal of Social and Economic Development*, 9(2).
- Child labor in China: Factories & child trafficking. (2012, December 5). *RSS*. Retrieved from <https://www.restlessstories.com/poverties/child-labour-in-china>
- China Labour Bulletin. (2007). Small hands: A survey report on child labour in China. CLB Research Series: *Protecting Worker Rights in China*, 6–7. Retrieved from http://ww2.usc.cuhk.edu.hk/PaperCollection/webmanager/wkfiles/6471_1_paper.pdf
- China Labour Bulletin. (2023, November 25). Child labour in China: Causes and solutions. Retrieved from <https://clb.org.hk/en/content/child-labour-china-causes-and-solutions>
- CSIS. (n.d.). Unpacking China's GDP, China power. *CSIS*. Retrieved from <https://chinapower.csis.org/tracker/china-gdp/>
- Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (2013). *International relations theories: Discipline and diversity (3rd ed.)*. Oxford University Press.
- Garnaut, R., & Song, L. (2012). China: Twenty years of economic reform. Acton, A.C.T., Australia: ANU E Press. https://doi.org/10.26530/OAPEN_459887
- Gunter, F., & Meldrum, D. H. (1993, November 21). The effects of customs union formation on nonmember countries welfare. Paper presented at the Southern Economic Association Conference, New Orleans, November 21, 1993. In Zhang, J. (1997, April). An assessment of Chinese thinking on trade liberalization. *Hoover Institution Stanford University*. Retrieved from <https://www.hoover.org/research/assessment-chinese-thinking-trade-liberalization>



- Halegua, A. (2007, April 10). The debate over raising Chinese labor standards goes international. *Harvard Law & Policy Review*. Retrieved from <https://harvardlpr.com/online-articles/the-debate-over-raising-chinese-labor-standards-goes-international/>
- He, L., & Zhu, C. (2023, July 27). Young Chinese are getting paid to be “full-time children” as jobs become harder to find. *CNN*. Retrieved from <https://edition.cnn.com/2023/07/26/economy/china-youth-unemployment-intl-hnk/index.html>
- Herispon. (2010). *Ekonomi mikro*. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Herispon-Herispon-2/publication/326344579_EKONOMI_MIKRO/links/5b46f1edaca272c609379302/EKONOMI-MIKRO.pdf
- International Labour Organization. (2002). China regulations banning child labour, 2002. *NATLEX*. Retrieved from <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/63806/65269/E02CHN01.htm>
- International Monetary Fund. (2024, July 16). World economic outlook update, July 2024: The global economy in a sticky spot. *IMF*. Retrieved from <https://www.imf.org/en/Publications/WEO>
- Isabela, M. A. C. (2022, March 20). Hukum mempekerjakan anak di bawah umur. *Kompas*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/20/04000051/hukum-mempekerjakan-anak-di-bawah-umur>
- Marx, K. (1887). *Capital: A critique of political economy, Volume I Book One: The process of production of capital*. Progress Publishers.
- Masterson, J. R. (2012). Analysing China’s economic interdependence and political relations with its neighbours. *China Information*, 26(1), 4. <https://doi.org/10.1177/0920203x11429893>
- Morley, A. (2010). The challenges of change: Causes and consequences of child labor in China. *Topical Research Digest: Human Rights in China*, 118–19. Retrieved from <https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/china/ChildLaborChina.pdf>
- Ni, V. (2021, July 1). 'Poverty divides us': Gap between rich and poor poses threat to China. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2021/jul/01/xi-jinping-gap-between-rich-and-poor-poses-biggest-threat-to-china>
- Organisation Economic Co-Operation and Development. (2002). China in the world economy: The domestic policy challenges: Synthesis report. Paris, France: OECD. Retrieved from <https://www.oecd.org/pensions/insurance/2075272.pdf>
- Saich, A. (2012). The quality of governance in China: The citizens’ view. *Faculty Research Working Paper Series*, 2. Retrieved from https://ash.harvard.edu/files/ash/files/quality_of_governance.pdf
- Sari, S. P. (2015). Apple role through Fair Labour Association (FLA) in order to fixing Foxconn's sweatshop in China. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 10(2), 206. <https://doi.org/10.26593/jihi.v10i2.1317.%25p>
- Siregar, A. E. (2010). Perdagangan bebas ASEAN-Tiongkok: Berdagang untuk siapa? *Jurnal Sosial Demokrasi*, 10. Retrieved from <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07003/2010-08.pdf>
- Small, R. (1982). Work, play and school in Marx's views on education. *The Journal of Educational Thought*, 16(3), 161. <https://www.jstor.org/stable/23768316>
- Take-Profit.org. (n.d.). China wages: Minimum and average. Retrieved from <https://take-profit.org/en/statistics/wages/china/#:~:text=What%20is%20minimum%20wage%20in,Human%20Resources%20and%20Social%20Security>
- Tang, C., Zhao, L., & Zhao, Z. (2018). Child labor in China. *China Economic Review*, 51, 149–66. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2016.05.006>
- The Observatory of Economic Complexity. (n.d.). Semi-finished products, stainless steel (HS: 721890) product trade, exporters and importers. *OEC*. Retrieved from <https://oec.world/en/profile/hs92/semi-finished-products-stainless-steel>
- The World Bank. (2021, March 29). Overview. *The World Bank*. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/country/china/overview>
- USC Annenberg. (2020, November 19). Wealth & inequality in the U.S. and China. *US*. Retrieved from <https://china.usc.edu/wealth-inequality-us-and-china>

- World Trade Organization. (2020). World trade statistical review 2020. *World Trade Statistical Review*, 76–154. <https://doi.org/10.30875/0a4fef8-en>
- Xiangguo, C. (2007). Is China the factory of the world? RCAPS Occasional Paper, 3–4. Retrieved from https://www.apu.ac.jp/rcaps/uploads/fckeditor/publications/workingPapers/RCAPS_Occasional_Paper_07-4.pdf
- Zhang, L. (2007). China children's rights. *The Law Library of Congress, Global Legal Research Directorate*, 61–70. Retrieved from <https://tile.loc.gov/storage-services/service/l1/lglrd/2018298966/2018298966.pdf>
- Zhou, Q., & Zhang, Z. (2021, August 11). Minimum wages in China 2021: A complete guide. *China Briefing News*. Retrieved from <https://www.china-briefing.com/news/minimum-wages-china-2021/>

